

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal penting pembangunan bangsa Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beranekaragam suku bangsa dan adat istiadat. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu menghadapi perkembangan zaman di era globalisasi. Globalisasi itu sendiri, menurut Syahrul (2018:111) merupakan proses tatanan masyarakat yang tidak menganal batas wilayah. Jaman globalisasi juga ditandai dengan makin menipisnya batas wilayah, paham, sekat kelompok serta makin mengecilnya berbagai perbedaan yang ada di setiap negara, baik yang berhubungan dengan sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan juga teknologi. Era globalisasi menuntut perubahan yang mendasar bagi setiap manusia, dalam memandang arus globalisasi sebagai suatu keharusan bukan sebagai ancaman, sehingga kita dapat senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tidak tertinggal dari yang lain.

Tantangan di era global yang mengancam suatu negara adalah krisis nasionalisme, di negara Indonesia. Semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda mulai menurun. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya generasi muda yang menganggap bahwa budaya Barat lebih kekinian dibanding dengan budaya sendiri. Generasi muda terutama di kalangan

pelajar, banyak mengikuti budaya Barat dan budaya Korean populer atau yang lebih dikenal dengan sebutan K-Pop dari pada budayanya sendiri. Misalnya dari cara bersikap, berpakaian, berbicara, sampai pola hidup cenderung meniru budaya asing dari pada budaya sendiri. Fenomena ini terjadi di hampir seluruh pelosok di kota-kota besar dan juga ke pelosok desa. Krisis nasionalisme di negara Indonesia pada era global ini, maka kiranya sudah sangat mendesak bagaimana mengembangkan sikap nasionalisme kepada para peserta didik sebagai warga negara yang dapat diandalkan bagi bangsa dan negara di masa depan.

Kurangnya nasionalisme mengakibatkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Winataputra dan Budimansyah (2007: 166) menjelaskan krisis nasionalisme melanda bangsa Indonesia, dengan bukti terjadinya kekerasan, pelanggaran lalu lintas, kebohongan publik, arogansi kekuasaan, korupsi kolektif, penyalahgunaan wewenang, konflik antara pemeluk agama, konflik antara rakyat dan penguasa, demonstrasi yang cenderung merusak, koalisi antar partai secara kontekstual dan musiman, politik yang kecurangan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, otonomi daerah yang berdampak tumbuhnya entrosntrisme dan lain-lain.

Permasalahan yang diakibatkan krisis nasionalisme tersebut dapat dilihat dari maraknya kasus-kasus tawuran antar pelajar di berbagai daerah. Misalnya saja hasil penelusuran Ferdiansyah (dalam metro.com, 2019) Komisi Perlindungan Anaka Indonesia (KPAI) mencatat kasus tawuran di

Indonesia meningkat 1,1% sepanjang tahun 2018 lalu, dari angka 12,9% menjadi 14% angka tersebut menunjukkan bahwa tawuran masih menjadi permasalahan yang harus di perhatikan oleh berbagai pihak terutama pihak sekolah. Selain itu hasil penelusuran Achmad (dalam okezone.com, 2019) menginformasikan bahwa kasus tawuran pelajar yang dilakukan oleh dua kelompok pelajar di Jawa Timur melakukan janji melalui media sosial untuk melakukan tawuran yang menyebabkan seorang remaja meninggal karena terkena benda tajam dan hasil penelusuran Isal (dalam detik.com, 2020) menginformasikan bahwa puluhan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan di Bekasi juga melakukan tawuran yang di akibatkan dari saling ejek di media sosial, hal ini merupakan tindakan negatif yang tidak menjunjung nilai karakter bangsa yang mengakibatkan krisis nasionalisme.

Selain kasus tawuran pelajar, permasalahan krisis nasionalisme yang ada di masyarakat, misalnya saja ditemukan berita dari Herdianto (dalam Kompas, 2019) yang menginformasikan bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin mudah diaksesnya internet, akan menimbulkan banyak pengaruh. Salah satunya, budaya-budaya Barat yang masuk ke Indonesia cepat diserap oleh setiap lapisan masyarakat. Berbagai perilaku dan penampilan gaya bahasa, pola pikir dan mode pakaian yang dipengaruhi oleh budaya Barat. Memang semua kebudayaan, pola pikir dan mode yang datang dari luar tidak semua negatif dan berdampak buruk pada identitas nasional bangsa tetapi yang terjadi adalah kecenderungan konsumtif

terhadap apa yang datang dari luar dan secara tidak disadari akan menggerus rasa nasionalisme dan kebanggaan masyarakat khususnya generasi muda.

Maka dari itu Santoso (Taniredja, 2010: 71) juga mengingatkan bahwa melemahnya semangat nasionalisme atau wawasan kebangsaan kita, disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain, 1) kualitas SDM masih rendah; 2) militansi bangsa yang mendekati titik kritis; 3) jati diri bangsa Indonesia yang sudah luntur. Menghadapi berbagai permasalahan tersebut, apabila tidak ada upaya yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan disintegrasi bangsa dapat menjadi ancaman aktual yang berpengaruh terhadap integritas dan kedaulatan NKRI.

Oleh karena itu, perwujudan agar dapat mengatasi tantangan globalisasi terutama krisis nasionalisme yaitu dengan pendidikan harus menampilkan diri sebagai bagian dari tantangan globalisasi tersebut. Suryadi (Adhitya, 2018:16) juga mengatakan bahwa “Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitasnya; dan semakin terdidik seseorang maka semakin tinggi pemahaman akan pentingnya kesehatan, partisipasi politik, toleransi dan kehidupan yang harmonis”. Trianto (2014) mengatakan bahwa pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan sarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya kehidupan. Pendidikan juga merupakan hal yang utama dalam membentuk karakter siswa yang memiliki sikap dan pribadi yang kuat. Pendidikan memiliki peran

yang penting, karena pendidikan akan membentuk suatu karakter dari masing-masing individu sehingga dapat menumbuhkan suatu bangsa yang mempunyai sikap cinta terhadap tanah air.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu proses kegiatan mengoptimalkan perkembangan potensi kecakapan siswa serta merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal untuk mencapai kemajuan bangsa serta meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian khusus yang ditunjukkan pada perkembangan dan kemajuan pendidikan guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

Pendidikan menjadi hal yang harus diperhatikan secara lebih karena menyangkut masa depan bangsa melalui generasi penerusnya yang dilaksanakan lewat pendidikan baik formal, informal maupun nonformal. Tujuan pendidikan yang tepat akan menentukan keberhasilan dalam proses pembentukan pribadi manusia. Seperti yang termuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Hal tersebut menyiratkan bahwa guru perlu mengembangkan aspek spiritual, pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik terlebih lagi, guru perlu memahami kebutuhan siswa. Kebutuhan yang dimaksud adalah

kesesuaian antara materi pelajaran dengan tahap perkembangan siswa dalam proses pembelajaran.

Proses pembelajaran merupakan aspek yang terintegrasi dari proses pendidikan. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada disekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar (Djamarah, 2010:39). Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya terdapat perbedaan, seperti perbedaan daya tangkap peserta didik dalam menerima pelajaran. Adanya perbedaan ini menjadikan guru harus mampu mengatur strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik.

Proses pembelajaran yang mengesankan dapat menjadikan pengalaman yang baik untuk siswa. Pembelajaran akan berjalan efektif apabila materi pembelajaran maupun metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kemampuan siswa (Trianto, 2014). Oleh karena itu hakikat pembelajaran adalah lebih kepada pengaturan.

Secara garis besar tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memiliki pengetahuan dan cerdas dalam berperilaku. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn). Mata pelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mengemban misi dalam pembentukan karakter warga negara yang baik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep pendidikan yang berfungsi untuk membentuk peserta didik sebagai warga negara yang mempunyai karakter. Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara.

Menurut pandangan Cogan (1999:4) yang mengartikan PKn atau *civic education* sebagai "*The foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*". Maksudnya adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Pembelajaran PPKn menurut Yosep (2016: 2) dikatakan sebagai pendidikan nilai yang merupakan salah satu wadah yang diharapkan siswa menyadari akan nilai terkait dalam pembelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada penanaman nilai dan pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, suku bangsa untuk menjadi warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Penanaman nilai dan pembentukan diri menjadi penting manakala siswa dihadapkan pada permasalahan yang ada pada pembelajaran maupun lingkungan. Siswa perlu dibekali dengan apa yang dinamakan sikap.

Sikap disini menurut Yosep (2016:2) mencakup tiga aspek, yaitu: pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan. Ketiga aspek ini harus dimiliki siswa terutama dalam sikap nasionalisme. Proses pembelajaran yang dilaksanakan tentu tidak hanya mengembangkan pengetahuan dan pemahaman siswa tetapi juga dengan penghayatan maupun dalam pelaksanaan . Penghayatan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh manusia adalah pada nilai-nilai, terutama dalam pembelajaran PPKn. Ketiga aspek perlu diseimbangkan karena saling berkaitan, agar proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Idealnya, pembelajaran PPKn menjadi landasan pembentukan sikap dan penanaman nasionalisme yang kuat.

Berdasarkan beberapa masalah yang terjadi di atas, pada saat observasi dan wawancara di SMP Negeri 2 Padamara peneliti juga menemukan beberapa masalah. Misalnya pada saat upacara berlangsung ada 41 % atau 70 siswa dari 170 siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Padamara terlihat mengikutinya dengan tidak hidmat, bahkan pada saat penghormatan bendera, ada siswa yang hormat kepada bendera sambil berbicara dengan teman sebelahnya, dan juga pada saat pembina upacara menyampaikan amanat siswa tidak mendengarkannya karena mereka asik berbicara sendiri. Jadi

seakan upacara hanya digunakan sebagai ajang peringatan tanpa mengenang suatu makna dalam upacara tersebut, yang merupakan sarana untuk menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang keras untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, masih banyak peserta didik yang masih melanggar tata tertib sekolah seperti datang ke sekolah terlambat, menggunakan jilbab yang tidak sesuai dengan aturan, dan memakai celana yang ketat. Ada sebanyak 35 % atau 60 peserta didik dari 170 peserta didik kelas VIII yang melanggar tata tertib sekolah. Peserta didik juga masih kurang akan kesadaran untuk menjaga lingkungan sekolahnya, yaitu salah satunya dengan masih banyaknya siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya.

Di dalam kelas juga siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran, yang terlihat dari tidak adanya siswa yang bertanya maupun mengemukakan pendapat. Siswa cenderung pasif dalam menerima materi yang diberikan guru. Bahkan, untuk memberikan pendapat atau bertanya saja masih malu-malu. Peneliti melakukan wawancara dengan guru PPKn kelas VIII di SMP Negeri 2 Padamara dan memperoleh rata nilai yang di peroleh oleh siswa pada saat tahun ajaran 2017/ 2018 sebesar 82 dan pada saat tahun pelajaran 2018/2019 sebesar 83 dalam materi pembelajaran mengenai kebangkitan nasional.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam penanaman sikap nasionalisme. Oleh karena itu, peneliti

tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap Sikap Nasionalisme Peserta Didik”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan

Ruang lingkup penelitian adalah mencakup tentang pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas VIII SMP Negeri 2 Padamara dalam konteks penanaman sikap nasionalisme sehingga mampu diterapkan oleh peserta didik dalam interelasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang menjadi perhatian peneliti “Adakah Pengaruh Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap Sikap Nasionalisme Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 2 Padamara semester genap tahun pelajaran 2019/2020?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan dapat memperoleh informasi, data dan gambaran mengenai Pengaruh antara Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap Sikap Nasionalisme Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 2 Padamara semester genap tahun pelajaran 2019/2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Pada tataran teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
- b. Memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Pembelajaran PPKn , baik yang berkaitan dengan aspek persiapan pembelajaran, pelaksanaan serta evaluasi pembelajaran.
- c. Memberikan gambaran tentang urgensi penanaman nilai sikap nasionalisme kepada generasi muda/ peserta didik melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

2. Manfaat praktis

Pada tatanan praktis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi:

a. Manfaat Bagi Sekolah

Penelitian ini bisa menjadi masukan bagi dunia pendidikan akan arti pentingnya lingkungan sekolah sebagai salah satu sarana dalam membina sikap dan perilaku peserta didik.

b. Manfaat Bagi Guru

Penelitian ini menjadi masukan bagi pendidik dalam membina sikap dan perilaku peserta didik khususnya melalui pembelajaran.

c. Manfaat Bagi Peserta Didik

Penelitian ini membangkitkan kesadaran akan arti penting pembelajaran PPKn khususnya dalam membangkitkan sikap nasionalisme peserta didik agar memiliki rasa cinta kepada negara dan bangsanya.

d. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sangat membantu untuk memberikan masukan atau menambah pengetahuan peneliti mengenai Pengaruh Pembelajaran PPKn terhadap Sikap Nasionalisme Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 2 Padamara